

## **Abstrak**

Riset ini mengungkap aktualisasi politik kewargaan di Indonesia yang mengalami permasalahan ketidakadilan melalui studi kasus gerakan perlawanan nelayan di Jakarta. Politik kewargaan menjadi perspektif yang digunakan untuk menjelaskan upaya warga dalam rangka mencapai kewargaan penuh melalui gerakan sosial. Gerakan sosial perlawanan kelompok nelayan menjadi praktik aktualisasi politik kewargaan untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak kewargaan. Konflik negara dan warga sering terjadi karena kebijakan negara dianggap tidak sesuai dengan harapan warga secara sosial, politik dan ekonomi. Metodologi dalam riset ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatori, sebagai suatu pendekatan *post positivism* yang menjelaskan secara spesifik dan mendalam masalah politik kewargaan melalui gerakan perlawanan nelayan terhadap reklamasi Teluk. Studi kasus ini menunjukkan suatu kebijakan dapat lahir tanpa adanya peran partisipasi dan *equality*. Teknik pengumpulan data dalam riset ini dengan wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Temuan riset ini mengungkapkan politik kewargaan mengalami pelemahan karna hak-hak sosial, politik, dan budaya warga tidak terpenuhi. Pelemahan politik kewargaan menunjukkan bahwa selain ada upaya dari negara untuk melemahkan ternyata warga itu sendiri juga masih lemah. Perlu adanya penguatan politik kewargaan dari warga itu sendiri melalui transformasi kewargaan.

**Kata Kunci:** Politik Kewargaan, Demokrasi, Gerakan Sosial, Kesetaraan

## *Abstract*

*This research reveals the actualization of civic politics in Indonesia, which experiences problems of injustice through a case study of the fishermen's resistance movement in Jakarta. Citizenship politics is the perspective used to explain the efforts of citizens in order to achieve full citizenship through social movements. The social movement of the fishermen's resistance group is a practice of actualizing civic politics to fight for equality of citizenship rights. Conflicts between the state and citizens often occur because state policies are considered incompatible with the expectations of citizens socially, politically and economically. The methodology in this research uses an explanatory qualitative approach, as a post-positivism approach that explains specifically and in-depth the problem of civic politics through the fishermen's resistance movement against the Gulf reclamation. This case study shows that a policy can be born without the role of participation and equality. Data collection techniques in this research are interviews and focus group discussions (FGDs). The findings of this research reveal that civic politics is weakened because the social, political and cultural rights of citizens are not fulfilled. The weakening of civic politics shows that in addition to the efforts of the state to weaken it, the citizens themselves are also still weak. It is necessary to strengthen the civic politics of the citizens themselves through civic transformation.*

**Keywords:** Political Citizenship, Democracy, Social Movements, Equality